



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

UNIT KERJA : BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MISNI
2. Jabatan : KEPALA BADAN
3. NHK : 134066

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.000.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 166 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA PEKANBARU , HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 343 m2/250 m2 di KAB / KOTA KOTA TANJUNG PINANG , HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
3. Tanah Seluas 21060 m2 di KAB / KOTA KAMPAR, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000
4. Tanah Seluas 17754 m2 di KAB / KOTA KAMPAR, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000
5. Tanah Seluas 16947 m2 di KAB / KOTA KAMPAR, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000
6. Tanah Seluas 20121 m2 di KAB / KOTA KAMPAR, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000
7. Tanah Seluas 11859 m2 di KAB / KOTA KAMPAR, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 70.000.000

1. MOBIL, TOYOTA YARIS MINIBUS Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 96.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 218.001.505



F. HARTA LAINNYA

Sub Total

Rp. ----

Rp. 2.384.501.505

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.384.501.505

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.